

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

- Adrian Sutedi. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Adrian Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Cetakan 6. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Arie Sukanti Hutagalung. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1983.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 6. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan 12. Jakarta: Penerbit Djambatan. 2008
- Editor Naim Mukhtar. *Menggali Hukum Adat dan Hukum Waris Minangkabau*. NV Sri Dharma. Padang. 1968.
- Effendi Perangin. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Cetakan 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994. hlm. 96.
- Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Pendaftaran Tanah*. Jakarta : Harvindo. 2008.
- Hilman Hadikusumah. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Jakarta: Alumni Bandung. 1983.
- Kurnia Warman. *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik*. Padang: Andalas University Press. 2006.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Mandar Maju. 2008.
- Nurullah. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Padang: PT.Singgalang Press. 1999.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 3. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.